



BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini akan menjelaskan teori-teori yang akan digunakan di dalam penelitian yang akan dilakukan. Selain teori, terdapat juga pengertian-pengertian mengenai pengungkapan, tanggung jawab sosial perusahaan, *Global Reporting Initiative*, dan juga menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Bab ini juga menjelaskan mengenai hasil penelitian yang sudah diteliti terlebih dahulu oleh peneliti lainnya dengan variabel terikat yang sama yaitu luas pengungkapan tanggung jawab sosial. Penelitian ini digunakan sebagai acuan bagi peneliti untuk menentukan hipotesis dalam penelitian ini.

A. Telaah Pustaka

1. Teori Legitimasi

Pengertian legitimasi menurut Dowling & Pfeffer (Dowling & Pfeffer, 1975) adalah:

“appraisal of action in terms of shared or common values in the context of the involvement of the action in the social system.”

Pengertian legitimasi menurut Gray et. Al (Gray, Kouhy, & Lavers, 1995:

54) adalah:

“... a condition or status which exists when an entity’s value system is congruent with the value system of the larger social system of which the entity is a part. When a disparity, actual or potential, exists between the two value system, there is a threat to the entity’s legitimacy.”



Menurut (Soraya, 2016) berpendapat legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi merupakan manfaat atau sumber daya potensial bagi perusahaan untuk mempertahankan hidup (*going concern*). Definisi tersebut mengisyaratkan bahwa legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah, individu, dan kelompok masyarakat.

Menurut Reverte (Reverte, 2009: 353) menyatakan bahwa teori legitimasi merupakan suatu gagasan tentang kontrak sosial dimana perusahaan setuju untuk melakukan tindakan sosial sehingga perusahaan dapat diterima oleh masyarakat dan dapat memenuhi tujuan perusahaan sehingga kelangsungan hidup perusahaan terjamin.

Teori legitimasi mengisyaratkan bahwa perusahaan hendaknya mengurangi *expectation gap* dengan masyarakat sekitar guna meningkatkan legitimasi (pengakuan) masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan hendak menjaga reputasinya, yaitu dengan menggeser pola orientasi (tujuan) yang semula semata-mata diukur dengan *economic measurement* yang cenderung *shareholder orientation*, ke arah memperhitungkan faktor sosial sebagai wujud kepedulian dan keberpihakan terhadap masalah sosial kemasyarakatan (*stakeholder orientation*). Perusahaan perlu menjaga legitimasi stakeholder serta mendudukkannya dalam kerangka kebijakan dan pengambilan keputusan, sehingga dapat mendukung dalam pencapaian tujuan perusahaan, yaitu stabilitas usaha dan jaminan *going concern*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Teori Stakeholder

Pengertian *stakeholder* menurut Hummels (Hummels, 1998: 1408) adalah:

“...(*stakeholder are*) individuals and groups who have a legitimate claim on the organization to participate in the decision-making process simply because they are affected by the organization’s practices, policies and actions.”

Dalam teori ini mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan ditentukan oleh para *stakeholders*, sehingga aktivitas perusahaan pun ditentukan atas pertimbangan dari para *stakeholders*-nya. Perusahaan berusaha mencari pembenaran dari para *stakeholders* dalam menjalankan operasi perusahaannya. Semakin kuat posisi *stakeholders*, semakin besar pula kecenderungan perusahaan mengadaptasi diri terhadap keinginan para *stakeholders*-nya.

Tamba juga mengatakan bahwa *stakeholder theory* menyatakan perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholder*-nya (pemegang saham, kreditur, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain). Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan tersebut. (Tamba, 2011)

Secara teoritis perusahaan besar tidak akan lepas dari tekanan. Di samping itu, perusahaan yang lebih besar dengan aktivitas operasi dan pengaruh yang lebih besar terhadap masyarakat mungkin akan memiliki pemegang saham yang memperhatikan program sosial yang dibuat perusahaan sehingga pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan akan semakin luas. Dari sisi tenaga kerja, dengan semakin banyaknya jumlah tenaga kerja dalam suatu perusahaan, maka tekanan pada pihak manajemen untuk memperhatikan kepentingan tenaga kerja akan semakin besar. Program berkaitan dengan tenaga kerja yang merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan, akan semakin banyak dilakukan oleh perusahaan. Hal ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



berarti bahwa program tanggung jawab sosial perusahaan juga semakin banyak dan akan diungkapkan dalam laporan tahunan. (Sembiring, 2005)

3. Teori Keagenan

Teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham (*shareholders*) sebagai *principal* dan manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk menjalankan kepentingan pemegang saham itu sendiri dan mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya kepada pemegang saham.

Jensen dan Meckling (Jensen & Meckling, 1976: 308) menjelaskan hubungan keagenan sebagai :

Agency relationship as a contract under which one or more person (the principals) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent."

Hal ini dapat menyebabkan manajer cenderung bertindak untuk kepentingan pribadi saja bukan untuk memaksimalkan perusahaan sehingga menyebabkan munculnya biaya keagenan (*agency cost*). *Agency cost* didefinisikan sebagai jumlah dari biaya pengawasan yang dilakukan oleh *principal* dengan jumlah dari biaya *bonding* yang dilakukan oleh agen serta jumlah dari biaya residual. (Jensen & Meckling, 1976: 308). Jenis biaya ini hampir dimiliki oleh semua perusahaan agar pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajer menjadi optimal sesuai dengan keinginan pemegang saham. Untuk meminimalisir *agency cost* maka dapat dilakukan proses *bonding mechanism* yaitu proses untuk menyamakan kepentingan manajemen melalui program mengikat manajemen dalam modal perusahaan.

Berdasarkan teori keagenan, perusahaan yang menghadapi biaya pengawasan dan biaya kontrak yang rendah cenderung akan melaporkan laba bersih rendah atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



dengan kata lain akan mengeluarkan biaya-biaya untuk kepentingan manajemen salah satunya biaya yang dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata masyarakat. Kemudian sebagai wujud pertanggungjawaban, manajer sebagai agen akan berusaha memenuhi seluruh keinginan pihak prinsipal dengan melakukan *corporate environmental disclosure* sebagai tindakan CSR. *Corporate environmental disclosure* merupakan sinyal yang dapat mengalihkan perhatian pemegang saham dari pengawasan manipulasi laba atau isu-isu lainnya dan sebagai hasilnya harga saham di pasar modal akan meningkat seiring meningkatnya kepercayaan pemegang saham terhadap transparansi informasi yang diungkapkan oleh perusahaan. (Rokhlinasari, 2016)

4. Teori Kecenderungan Pengungkapan Sosial

Gray et. al (Gray et al., 1995: 50), mengemukakan berbagai teori untuk menjelaskan kecenderungan pengungkapan sosial dalam tiga kelompok utama, yaitu:

a. *Decisions usefulness studies*

Pengungkapan tanggung jawab sosial dilakukan karena informasi tersebut dibutuhkan oleh para pemakai laporan keuangan dan ditempatkan pada posisi yang *moderately important*. Informasi akuntansi tersebut tidak terbatas pada informasi akuntansi tradisional yang telah dikenal selama ini, namun juga informasi lain yang relatif baru dalam wacana akuntansi.

b. *Economic theory studies*

Studi tentang teori ekonomi dalam *corporate responsibility reporting* ini mendasarkan diri pada *economic agency theory* dan *accounting positive theory*. Studi ini menggunakan teori agensi yang menganalogikan manajemen adalah



agen dari suatu *principal*. Lazimnya, *principal* diartikan sebagai pemegang saham atau *traditional users* lain. Namun, pengertian *principal* tersebut meluas menjadi seluruh *interest group* perusahaan, pihak manajemen melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial sebagai upaya untuk memenuhi tuntutan publik.

Social and political theory studies

Studi dibidang ini menggunakan teori *stakeholder* dan teori legitimasi. Teori *stakeholder* mengasumsikan eksistensi perusahaan tergantung perusahaan dapat memenuhi kebutuhan *stakeholder*-nya. Sedangkan teori legitimasi, perusahaan dapat menempatkan diri ditengah lingkungan masyarakat dapat diwujudkan melalui pengungkapan sosial sebagai cara perusahaan untuk berdialog dengan masyarakat sehingga dimata masyarakat akan keberadaan dan tindakan perusahaan terlegitimasi.

Dengan melakukan pengungkapan CSR perusahaan akan mendapatkan timbal balik yang positif dari para stakeholder berupa peningkatan reputasi perusahaan serta pengambilan keputusan pemangku kepentingan berupa, membeli saham, memberikan pinjaman modal, dan membeli produk, sehingga akan memperbaiki kinerja perusahaan termasuk kinerja keuangan. Merakati menyatakan bahwa perusahaan melakukan pengungkapan Corporate Social Responsibility dengan harapan dapat meningkatkan reputasi dan nilai perusahaan. (Merakati, 2016)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5. Pengungkapan

a. Pengertian Pengungkapan

Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statement keuangan.

Menurut Evans (Evans, 2003: 334) pengertian pengungkapan atau *disclosure* adalah sebagai berikut :

“Disclosure means supplying information in the financial statements, including the statements themselves, the notes to the statements, and the supplementary disclosures associated with the statements. It does not extend to public or private statements made by management or information provided outside the financial statements.”

Menurut Yuliansyah (Yuliansyah, 2017: 2), peraturan mengenai pelaksanaan CSR di Indonesia telah tertuang dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74, yang menyatakan bahwa perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selain itu, UU No. 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat 3, menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan, untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Menurut Daniel (Daniel, 2013: 5), pengungkapan adalah mengkomunikasikan posisi keuangan dengan tidak menyembunyikan informasi. Informasi yang diberikan haruslah lengkap, jelas, dan dapat menggambarkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



secara tepat mengenai kejadian-kejadian ekonomi yang berpengaruh terhadap hasil operasi unit usaha tersebut.

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

b. Tujuan Pengungkapan

Tujuan pengungkapan menurut Suwardjono (Suwardjono, 2010: 580) adalah sebagai berikut :

(1) Tujuan Melindungi

Tujuan melindungi dilandasi oleh gagasan bahwa tidak semua pemakai cukup canggih sehingga pemakai yang naif perlu dilindungi dengan mengungkapkan informasi yang mereka tidak mungkin memperolehnya atau tidak mungkin mengolah informasi untuk menangkap substansi ekonomik yang melandasi suatu pos statemen keuangan. Dengan kata lain, pengungkapan ditujukan untuk melindungi perlakuan manajemen yang mungkin kurang adil dan terbuka.

(2) Tujuan Informatif

Tujuan informatif dilandasi oleh gagasan bahwa pemakai yang dituju sudah jelas dengan tingkat kecanggihan tertentu. Dengan demikian, pengungkapan diarahkan untuk menyediakan informasi yang dapat membantu keefektifan pengambilan keputusan pemakai tersebut. Tujuan ini biasanya melandasi penyusunan standar akuntansi untuk menentukan tingkat pengungkapan.

(3) Tujuan Kebutuhan Khusus

Tujuan kebutuhan khusus merupakan gabungan dari tujuan perlindungan publik dan tujuan informatif. Apa yang harus diungkapkan kepada publik dibatasi dengan apa yang dipandang bermanfaat bagi pemakai yang dituju sementara untuk tujuan pengawasan, informasi tertentu harus disampaikan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kepada badan pengawas berdasarkan peraturan melalui formulir-formulir yang menuntut pengungkapan secara rinci.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

c. Tingkatan Pengungkapan

Evans (Evans, 2003: 336) mengidentifikasi tiga tingkat pengungkapan, yaitu :

(1) *Adequate Disclosure* (pengungkapan yang memadai)

Adalah tingkat minimum yang harus dipenuhi agar statemen keuangan secara keseluruhan tidak menyesatkan untuk kepentingan pengambilan keputusan yang diarah.

(2) *Fair or Ethical Disclosure* (pengungkapan yang wajar)

Adalah tingkat yang harus dicapai agar semua pihak mendapat perlakuan atau pelayanan informasional yang sama. Artinya tidak ada satu pihak pun yang kurang mendapat informasi sehingga mereka menjadi pihak yang kurang diuntungkan posisinya.

(3) *Full Disclosure* (pengungkapan yang penuh)

Adalah tingkatan yang menuntut penyajian secara penuh semua informasi yang berpaut dengan pengambilan keputusan yang diarah.

d. Metode Pengungkapan

Beberapa metode yang dapat digunakan untuk melakukan pengungkapan berdasarkan Suwardjono (Suwardjono, 2010: 591-600) antara lain :

(1) Pos Statemen Keuangan

Informasi keuangan dapat diungkapkan melalui statemen keuangan dalam bentuk pos atau elemen statemen keuangan sesuai dengan standar tentang definisi, pengukuran, penilaian, dan penyajian. Jenis statemen meliputi neraca, statemen laba-rugi, statemen perubahan ekuitas, dan statemen aliran kas.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

(2) Catatan Kaki

Catatan kaki (*footnotes*) atau catatan atas statement keuangan (*notes to financial statements*) adalah metode pengungkapan untuk informasi yang tidak praktis atau tidak memenuhi kriteria untuk disajikan dalam bentuk pos atau elemen statemen keuangan. Catatan kaki harus digunakan dengan penuh kearifan karena memang ada keunggulan dan kelemahan.

(3) Penjelasan dalam Kurung

Penjelasan singkat berbentuk tanda kurung mengikuti suatu pos dapat dijadikan cara untuk mengungkapkan informasi. Metode akuntansi, makna suatu istilah, ketermasukan suatu unsur, penilaian alternatif, dan acuan merupakan informasi yang dapat disajikan dalam tanda kurung. Pengungkapan dalam bentuk tanda kurung lebih merupakan konvensi daripada sebagai ketentuan standar akuntansi.

(4) Penggunaan Istilah Teknis

Istilah teknis dan strategik merupakan bagian dari pengungkapan. Istilah yang tepat harus digunakan secara konsisten untuk nama pos, elemen, judul, atau subjudul. Penyusun standar banyak menciptakan istilah-istilah teknis untuk merepresentasikan suatu realita atau makna dalam akuntansi.

(5) Lampiran

Statemen keuangan utama dapat dipandang seperti ringkasan eksekutif dalam pelaporan manajemen (internal). Rincian, statemen tambahan (*supplementary statements*), daftar rincian, atau semacamnya dapat disajikan sebagai

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



lampiran atau disajikan dalam seksi lain yang terpisah dengan statemen utama.

(6) Komunikasi Manajemen

Manajemen dapat menyampaikan informasi kualitatif atau nonfinansial yang dirasa penting untuk diketahui pemakai statemen melalui berbagai cara. Salah satu caranya adalah wawancara manajer dengan wartawan, merupakan bentuk pengungkapan atau komunikasi manajemen. Komunikasi manajemen secara resmi dapat disampaikan bersamaan dengan penerbitan laporan tahunan dalam bentuk surat ke pemegang saham, laporan dewan komisaris, laporan direksi, dan diskusi serta analisis manajemen.

(7) Catatan dalam Laporan Auditor

Pengungkapan auditor yang dianggap penting dan bermanfaat adalah pengungkapan informasi yang berkaitan dengan hal-hal yang menghalangi auditor untuk menerbitkan laporan auditor bentuk standar. Syarat-syarat penerbitan laporan auditor standar adalah :

- (a) Semua statemen telah masuk dalam seperangkat penuh statemen keuangan yang diaudit.
- (b) Ketiga standar umum standar pengauditan berterima umum telah dilaksanakan dalam segala kegiatan yang berkaitan dengan penugasan audit.
- (c) Statemen keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.
- (d) Tidak terdapat keadaan-keadaan yang menuntut tambahan paragraf penjelas atau modifikasi susunan kalimat laporan audit.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



6. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

a. Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Menurut Wibisono (Wibisono, 2016: 8), *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang mencakup aspek ekonomi sosial dan lingkungan (*triple bottom line*) dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Menurut Wibisono (Wibisono, 2016: 32-37), istilah *Triple Bottom Line* dipopulerkan oleh John Elkington pada tahun 1997 (Elkington, 1997). Elkington memberi pandangan bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan, haruslah memperhatikan “3P”. Selain mengejar *profit*, perusahaan juga mesti memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*). Dalam gagasan tersebut, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu aspek ekonomi yang direfleksikan dalam kondisi *financial*-nya saja, namun juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya. 3P tersebut adalah :

(1) *Profit* (Keuntungan)

Profit merupakan unsur terpenting dan menjadi tujuan utama dari setiap kegiatan usaha. Tak heran bila tujuan utama dari seluruh kegiatan dalam perusahaan adalah mendongkrak harga saham setinggi-tingginya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Aktivitas yang dapat ditempuh untuk mendongkrak *profit* antara lain dengan meningkatkan produktivitas dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



melakukan efisiensi biaya, sehingga perusahaan mempunyai keunggulan kompetitif yang dapat memberikan nilai tambah semaksimal mungkin.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

(2) *People* (Masyarakat Pemangku Kepentingan)

Menyadari bahwa masyarakat merupakan *stakeholders* penting bagi perusahaan, karena dukungan mereka, terutama masyarakat sekitar, sangat diperlukan bagi keberadaan, kelangsungan hidup, dan perkembangan perusahaan, maka sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan masyarakat lingkungan, perusahaan perlu berkomitmen untuk berupaya memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada mereka. Selain itu juga perlu disadari bahwa operasi perusahaan berpotensi memberikan dampak kepada masyarakat. Karenanya pula perusahaan perlu untuk melakukan berbagai kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

(3) *Planet* (Lingkungan)

Unsur ketiga yang harus diperhatikan pula adalah planet atau lingkungan. Lingkungan adalah sesuatu yang terkait dengan seluruh bidang kehidupan kita. Semua kegiatan yang kita lakukan berhubungan dengan lingkungan. Namun sayangnya, sebagian besar dari kita masih kurang peduli dengan lingkungan sekitar. Hal ini antara lain disebabkan karena tidak ada keuntungan langsung di dalamnya. Keuntungan merupakan inti dari dunia bisnis dan itu adalah hal yang wajar. Maka, kita melihat banyak pelaku industri yang hanya mementingkan bagaimana menghasilkan uang sebanyak-banyaknya tanpa melakukan upaya apapun untuk melestarikan lingkungan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Keterlibatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Menurut Harahap (Harahap, 2001: 356-358), ada tiga pandangan atau model yang menggambarkan tentang keterlibatan perusahaan dalam kegiatan sosial, yaitu :

(1) Model Klasik

Menurut model ini, suatu usaha yang dilakukan perusahaan semata-mata hanya untuk memenuhi permintaan pasar dan mencari untung yang akan dipersembahkan kepada pemilik modal.

(2) Model Manajemen

Menurut model ini, perusahaan dianggap sebagai lembaga permanen yang hidup dan punya tujuan tersendiri. Manajer sebagai orang yang dipercayai oleh pemilik modal menjalankan perusahaan untuk kepentingan bukan saja pemilik modal, tetapi juga mereka yang terlibat langsung dengan hidup matinya perusahaan. Dengan demikian, manajer sebagai tim yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup perusahaan terpaksa memilih kebijakan yang harus mempertimbangkan tanggung jawab sosial perusahaan mengingat ketergantungan dengan pihak lain yang juga punya andil dalam pencapaian tujuan perusahaan yang tidak hanya memikirkan setoran untuk pemilik modal.

(3) Model Lingkungan Sosial

Model ini menekankan bahwa perusahaan meyakini bahwa kekuasaan ekonomi dan politik yang dimilikinya mempunyai hubungan dengan kepentingan (bersumber) dari lingkungan sosial dan bukan hanya semata dari pasar sesuai dengan teori model klasik. Perusahaan harus berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan penyakit sosial yang berada di lingkungannya.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Harahap (Harahap, 2001: 360-361) mengemukakan tiga bentuk tanggung jawab sosial perusahaan sebagai berikut :

(1) *Corporate philanthropy*

Tanggung jawab perusahaan berada pada sebatas kedermawanan atau kerelaan, belum sampai pada tanggung jawabnya. Bentuk tanggung jawab ini bisa merupakan kegiatan amal, sumbangan atau kegiatan lain yang mungkin saja tidak langsung berhubungan dengan kegiatan perusahaan.

(2) *Corporate responsibility*

Kegiatan pertanggungjawaban sudah merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan. Hal itu terjadi karena ketentuan UU atau bagian dari kemauan atau kesediaan perusahaan.

(3) *Corporate policy*

Tanggung jawab sosial perusahaan sudah merupakan bagian dari kebijakannya.

d. Tahap-Tahap Perencanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Menurut Wibisono (Wibisono, 2016: 127), tahap-tahap perencanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah berhasil adalah sebagai berikut :

(1) Tahap Perencanaan

Perencanaan terdiri atas tiga langkah utama yaitu *Awareness Building*; *CSR Assesment*, dan *CSR Manual Building*.

Awareness Building merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting CSR dan komitmen manajemen. Upaya ini dapat dilakukan melalui seminar, diskusi kelompok, lokakarya, dan lain-lain.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



CSR Assessment merupakan upaya untuk memetakan kondisi perusahaan dan mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu mendapatkan prioritas perhatian dan langkah-langkah yang tepat untuk membangun struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan CSR secara efektif.

Dan langkah terakhir adalah *CSR Manual Building*. Hasil *assessment* merupakan dasar untuk langkah terakhir ini. Upaya yang mesti dilakukan antara lain melalui *benchmarking*, menggali dari referensi atau bagi perusahaan yang menginginkan langkah cepat, penyusunan manual ini dapat dibantu oleh tenaga ahli independen dari luar perusahaan.

(2) Tahap Implementasi

Tahap implementasi terdiri atas tiga langkah utama yaitu sosialisasi, pelaksanaan, dan internalisasi.

Sosialisasi diperlukan untuk memperkenalkan kepada komponen perusahaan mengenai berbagai aspek yang terkait dengan implementasi CSR khususnya mengenai pedoman penerapan CSR. Tujuan sosialisasi ini adalah agar program CSR yang akan diimplementasikan mendapat dukungan penuh dari seluruh komponen perusahaan.

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan harus sejalan dengan pedoman CSR yang ada, berdasarkan dengan *roadmap* yang telah disusun.

Internalisasi adalah tahap jangka panjang. Internalisasi mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan CSR di dalam seluruh proses bisnis perusahaan. Dengan upaya ini dapat dinyatakan bahwa penerapan CSR bukan sekadar pelengkap namun telah menjadi strategi perusahaan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(3) Tahap Evaluasi

Langkah berikutnya adalah evaluasi program. Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan CSR. Bila ada program mengalami kegagalan, maka akan dilakukan evaluasi dan sebaliknya bila tidak ada program yang mengalami kegagalan, maka tidak dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk pengambilan keputusan. Evaluasi juga bisa dilakukan dengan meminta pihak independen untuk melakukan audit implementasi atas praktik CSR yang telah dilakukan.

(4) Pelaporan

Pelaporan diperlukan dalam rangka membangun sistem informasi baik untuk keperluan proses pengambilan keputusan maupun keperluan keterbukaan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

e. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Menurut Tamba (Tamba, 2011), prinsip-prinsip dasar tanggung jawab sosial yang menjadi dasar bagi pelaksanaan yang menjiwai atau menjadi informasi dalam pembuatan keputusan dan kegiatan tanggung jawab sosial menurut ISO 26000 meliputi: kepatuhan kepada hukum, menghormati instrument / badan-badan internasional, menghormati *stakeholders* dan kepentingannya, akuntabilitas, transparansi, perilaku yang beretika, melakukan tindakan pencegahan, dan menghormati dasar-dasar hak asasi manusia.

f. Manfaat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Dengan memperhatikan lingkungan, perusahaan dapat ikut berpartisipasi dalam usaha pelestarian lingkungan demi terpeliharanya kualitas hidup umat manusia dalam jangka panjang. Keterlibatan perusahaan dalam pemeliharaan dan



pelestarian lingkungan berarti perusahaan berpartisipasi dalam usaha mencegah terjadinya bencana serta meminimalkan dampak bencana yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Menurut Untung (Untung, 2009: 6-7), beberapa manfaat yang dapat diperoleh perusahaan melalui pelaksanaan CSR ini adalah :

- (1) Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan.
- (2) Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial.
- (3) Mereduksi risiko bisnis perusahaan.
- (4) Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha.
- (5) Membuka peluang pasar yang lebih luas.
- (6) Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah.
- (7) Memperbaiki hubungan dengan *stakeholders*.
- (8) Memperbaiki hubungan dengan regulator.
- (9) Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan.
- (10) Peluang mendapatkan penghargaan.

7 Global Reporting Initiative (GRI)

g. Pengertian GRI

Global Reporting Initiative (GRI) adalah sebuah organisasi internasional independen yang membantu bisnis, pemerintah, dan organisasi lainnya untuk memahami dan mengkomunikasikan dampak bisnis pada isu-isu keberlanjutan penting seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, korupsi, dan yang lainnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



h. Indikator GRI

Indikator pengungkapan tanggung jawab sosial menurut GRI terdiri dari 3 indikator, yaitu indikator kinerja ekonomi, indikator kinerja lingkungan dan indikator kinerja sosial.

Aspek kinerja ekonomi meliputi kinerja ekonomi, keberadaan pasar, praktek pengadaan dan dampak ekonomi tidak langsung. Kinerja lingkungan meliputi bahan baku, air, energi, keanekaragaman hayati, emisi, efluen dan limbah, transportasi, produk dan jasa, kepatuhan, lain-lain, asesmen pemasok atas lingkungan, dan mekanisme pengaduan lingkungan.

Indikator kinerja sosial berhubungan dengan ketenagakerjaan, hak asasi manusia, masyarakat dan tanggung jawab produk. Di dalam hal ketenagakerjaan aspek yang dinilai yaitu kepegawaian, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, pelatihan dan pendidikan, keberagaman dan kesetaraan peluang, dan kesempatan setara.

Berikut penjelasan mengenai indikator *Global Reporting Initiative, G4 Guidelines* (Initiative, 2013: 48-83) :

Tabel 2.1
GRI G4 Guidelines

No	Indikator Kinerja: Ekonomi	
A	Kategori 1: Ekonomi	
a)	Aspek: Kinerja Ekonomi	
1	EC1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan.
2	EC2	Implikasi finansial dan risiko serta peluang lainnya kepada kegiatan organisasi karena perubahan iklim.
3	EC3	Cakupan kewajiban organisasi atas imbalan pasti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4	EC4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah.
b) Aspek: Keberadaan Pasar		
5	EC5	Rasio upah standar pegawai pemula (<i>entry level</i>) menurut gender dibandingkan dengan upah minimum regional di lokasi-lokasi operasional yang signifikan.
6	EC6	Perbandingan manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat lokal di lokasi operasi yang signifikan.
c) Aspek: Dampak Ekonomi Tidak Langsung		
7	EC7	Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan.
8	EC8	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk besarnya dampak.
d) Aspek: Praktik Pengadaan		
9	EC9	Perbandingan pembelian dari pemasok lokal di lokasi operasional yang signifikan.
Indikator Kinerja: Lingkungan		
B Kategori 2: Lingkungan		
a) Aspek: Bahan		
10	EN1	Bahan yang digunakan berdasarkan berat atau volume.
11	EN2	Persentase bahan yang digunakan yang merupakan bahan input daur ulang.
b) Aspek: Energi		
12	EN3	Konsumsi energi dalam organisasi.
13	EN4	Konsumsi energi diluar organisasi.
14	EN5	Intensitas energi.
15	EN6	Pengurangan konsumsi energi.
16	EN7	Pengurangan kebutuhan energi pada produk dan jasa.

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c) Aspek: Air		
17	EN8	Total pengambilan air berdasarkan sumber.
18	EN9	Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air.
19	EN10	Persentase dan total volume air yang didaur ulang dan digunakan kembali.
d) Aspek: Keanekaragaman Hayati		
20	EN11	Lokasi-lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola didalam, atau yang berdekatan dengan kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan lindung.
21	EN12	Uraian dampak signifikan kegiatan, produk, dan jasa terhadap keanekaragaman hayati di kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan lindung.
22	EN13	Habitat yang dilindungi dan dipulihkan.
23	EN14	Jumlah total spesies dalam IUCN <i>RED LIST</i> dan spesies dalam daftar spesies yang dilindungi nasional dengan habitat ditempat yang dipengaruhi operasional, berdasarkan tingkat risiko kepunahan.
e) Aspek: Emisi		
24	EN15	Emisi gas rumah kaca (GRK) langsung (Cakupan 1).
25	EN16	Emisi gas rumah kaca (GRK) energi tidak langsung (Cakupan 2).
26	EN17	Emisi gas rumah kaca (GRK) tidak langsung lainnya (Cakupan 3).
27	EN18	Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK).
28	EN19	Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK).
29	EN20	Emisi bahan perusak ozon (BPO).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



30	EN21	NO _x , SO _x dan emisi udara signifikan lainnya.
f)	Aspek: Efluen dan Limbah	
31	EN22	Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan.
32	EN23	Bobot total limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan.
33	EN24	Jumlah dan volume total tumpahan signifikan.
34	EN25	Bobot limbah yang dianggap berbahaya menurut ketentuan konvensi Basel 2 Lampiran I, II, III dan VIII yang diangkut, diimpor, diekspor atau diolah dan persentase limbah yang diangkut untuk pengiriman internasional.
35	EN26	Identitas, ukuran, status lindung, dan nilai keanekaragaman hayati dari badan air dan habitat terkait yang secara signifikan terkena dampak dari air buangan dan limpasan dari organisasi.
g)	Aspek: Produk dan Jasa	
36	EN27	Tingkat mitigasi dampak terhadap dampak lingkungan produk dan jasa.
37	EN28	Persentase produk yang terjual dan kemasannya yang direklamasikan menurut kategori.
h)	Aspek: Kepatuhan	
38	EN29	Nilai moneter denda signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter karena ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan lingkungan.
i)	Aspek: Transportasi	
39	EN30	Dampak lingkungan signifikan dari pengangkutan produk dan barang lain serta bahan untuk operasional organisasi dan pengangkutan tenaga kerja.
j)	Aspek: Lain-Lain	

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



40	EN31	Total pengeluaran dan investasi perlindungan lingkungan berdasarkan jenis.
C Aspek: Asesmen Pemasok atas Lingkungan		
41	EN32	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan.
42	EN33	Dampak lingkungan negatif signifikan aktual dan potensial dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil.
D Aspek: Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan		
43	EN34	Jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan, ditangani dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi.
Indikator Kinerja: Sosial		
C Kategori 3: Praktik Ketenagakerjaan dan Kenyamanan Bekerja		
a) Aspek: Kepegawaian		
44	LA1	Jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan baru dan <i>turnover</i> karyawan menurut kelompok umur, gender, dan wilayah.
45	LA2	Tunjangan yang diberikan bagi karyawan purnawaktu yang tidak diberikan bagi karyawan sementara atau paruh waktu, berdasarkan lokasi operasi yang signifikan.
46	LA3	Tingkat kembali bekerja dan tingkat retensi setelah cuti melahirkan, menurut gender.
b) Aspek: Hubungan Industrial		
47	LA4	Jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahan operasional, termasuk apakah hal tersebut tercantum dalam perjanjian bersama.
c) Aspek: Kesehatan dan Keselamatan Kerja		
48	LA5	Persentase total tenaga kerja yang diwakili dalam komite bersama formal manajemen-pekerja yang membantu mengawasi dan

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



		memberikan saran program kesehatan dan keselamatan kerja.
49	LA6	Jenis dan tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari hilang dan kemangkiran serta jumlah total kematian akibat kerja, menurut daerah dan gender.
50	LA7	Pekerjaan yang sering terkena atau beresiko tinggi terkena penyakit yang terkait dengan pekerjaan mereka.
51	LA8	Topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian formal dengan serikat pekerja.
d) Aspek: Pelatihan dan Pendidikan		
52	LA9	Jam pelatihan rata-rata pertahun per karyawan menurut gender, dan menurut kategori karyawan.
53	LA10	Program untuk manajemen keterampilan dan pembelajaran seumur hidup yang mendukung keberlanjutan kerja karyawan dan membantu mereka mengelola purna bakti.
54	LA11	Persentase karyawan yang menerima review kinerja dan pengembangan karier secara regular menurut gender dan kategori karyawan.
e) Aspek: Keberagaman dan Kesetaraan Peluang		
55	LA12	Komposisi badan tata kelola dan pembagian karyawan per kategori karyawan menurut gender, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas dan indikator keberagaman lainnya.
f) Aspek: Kesetaraan Remunerasi Perempuan dan Laki-Laki		
56	LA13	Rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki menurut kategori karyawan, berdasarkan lokasi operasional yang signifikan.
g) Aspek: Asesmen Pemasok atas Praktik Ketenagakerjaan		

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



57	LA14	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria praktik ketenagakerjaan.
58	LA15	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap praktik ketenagakerjaan dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil.
Aspek: Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan		
59	LA16	Jumlah pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui pengaduan resmi.
Kategori 4: Hak Asasi Manusia		
Aspek: Investasi		
60	HR1	Jumlah total dan persentase perjanjian dan kontrak investasi yang signifikan yang menyertakan klausul terkait hak asasi manusia atau penapisan berdasarkan hak asasi manusia.
61	HR2	Jumlah waktu pelatihan karyawan tentang kebijakan/prosedur HAM terkait dengan aspek HAM yang relevan dengan operasi, termasuk persentase karyawan yang dilatih.
Aspek: Non Diskriminasi		
62	HR3	Jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang diambil.
Aspek: Kebebasan Berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama		
63	HR4	Operasi dan pemasok teridentifikasi yang mungkin melanggar atau beresiko tinggi melanggar hak untuk melaksanakan kebebasan berserikat dan perjanjian kerja bersama, dan tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut.
Aspek: Pekerja Anak		
64	HR5	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi beresiko tinggi melakukan eksploitasi pekerja anak dan tindakan yang diambil untuk berkontribusi dalam penghapusan pekerja anak yang efektif.

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



e)	Aspek: Pekerja Paksa atau Wajib Kerja	
65	HR6 C Hak cipta milik	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi beresiko tinggi melakukan pekerja paksa atau wajib kerja dan tindakan untuk berkontribusi dalam penghapusan segala bentuk pekerja paksa atau wajib kerja.
f)	Aspek: Praktik Pengamanan	
66	HR7 K (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Persentase petugas pengamanan yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur hak asasi manusia di organisasi yang relevan dengan operasi.
g)	Aspek: Hak Adat	
67	HR8 g Undang-undang	Jumlah total insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat dan tindakan yang diambil.
h)	Aspek: Asesmen	
68	HR9 Kwik Kian Gie	Jumlah total dan persentasi operasi yang telah melakukan review atau asesmen dampak hak asasi manusia.
i)	Aspek: Asesmen Pemasok atas Hak Asasi Manusia	
69	HR10 Kwik Kian Gie	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia.
70	HR11 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap hak asasi manusia dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil.
j)	Aspek: Mekanisme Pengaduan Masalah Hak Asasi Manusia	
71	HR12 Kwik Kian Gie	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi manusia yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui pengaduan formal.
E	Kategori 5: Masyarakat	
a)	Aspek: Masyarakat Lokal	
72	SO1	Persentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, asesmen dampak dan program pengembangan yang diterapkan.

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



73	SO2	Operasi dengan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat lokal.
b) Aspek: Anti Korupsi		
74	SO3	Jumlah total dan persentase operasi yang dinilai terhadap risiko terkait dengan korupsi dan risiko signifikan yang teridentifikasi.
75	SO4	Komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi.
76	SO5	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil.
c) Aspek: Kebijakan Publik		
77	SO6	Nilai total kontribusi politik berdasarkan negara dan penerima/penerima manfaat.
d) Aspek: Anti Persaingan		
78	SO7	Jumlah total tindakan hukum terkait anti persaingan, anti-trust, serta praktik monopoli dan hasilnya.
e) Aspek: Kepatuhan		
79	SO8	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan.
f) Aspek: Asesmen Pemasok atas Dampak Terhadap Masyarakat		
80	SO9	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria dampak terhadap masyarakat.
81	SO10	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil.
g) Aspek: Mekanisme Pengaduan Dampak Terhadap Masyarakat		
82	SO11	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap masyarakat yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi.
F Kategori 6: Tanggung Jawab atas Produk		

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



a) Aspek: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan	
83	PR1 Persentase kategori produk dan jasa yang signifikan yang dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan yang dinilai untuk peningkatan.
84	PR2 Total jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa sepanjang daur hidup, menurut jenis hasil.
b) Aspek: Pelabelan Produk dan Jasa	
85	PR3 Jenis informasi produk dan jasa yang diharuskan oleh prosedur organisasi terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, serta persentase kategori produk dan jasa yang signifikan harus mengikuti persyaratan informasi sejenis.
86	PR4 Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, menurut jenis hasil.
87	PR5 Hasil survei untuk mengukur kepuasan pelanggan.
c) Aspek: Komunikasi Pemasaran	
88	PR6 Penjualan produk yang dilarang atau disengketakan.
89	PR7 Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang komunikasi pemasaran, termasuk iklan, promosi, dan sponsor menurut jenis hasil.
d) Aspek: Privasi Pelanggan	
90	PR8 Jumlah total keluhan yang terbukti terkait dengan pelanggaran privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan.
e) Aspek: Kepatuhan	
91	PR9 Nilai moneter denda yang signifikan atas ketidakpatuhan terhadap undang-

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C	undang dan peraturan terkait penyediaan dan penggunaan produk dan jasa.
---	---

Sumber : Pedoman Pelaporan Keberlanjutan (2013)

8. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Sosial

i. Profitabilitas

Menurut Agustina (Agustina, 2013), perusahaan yang dapat memperoleh laba besar dapat dikatakan berhasil atau memiliki kinerja keuangan yang baik. Hal ini dikarenakan profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan manajemen perusahaan. Kamil dan Herusetya (Kamil & Herusetya, 2012: 9) berpendapat bahwa tingkat profitabilitas yang semakin besar menunjukkan perusahaan mampu mendapatkan laba yang semakin besar, sehingga perusahaan mampu untuk meningkatkan aktivitas tanggung jawab sosial, serta mengungkapkan tanggung jawab sosialnya dalam laporan tahunan dengan lebih luas.

Tingkat profitabilitas dapat menunjukkan seberapa baik pengelolaan manajemen perusahaan, semakin tinggi tingkat profitabilitas, maka cenderung akan semakin luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

j. Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang harus dibayar dengan aset lancarnya untuk kelangsungan operasional perusahaan seperti pembelian bahan baku, hutang yang jatuh tempo dan pembayaran tenaga kerja. Menurut penelitian Silaen (Silaen, 2013) menyatakan bahwa tingkat likuiditas berpengaruh terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial. Sedangkan menurut Yuliansyah (Yuliansyah, 2017: 9)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menyatakan bahwa tingkat likuiditas tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial.

Diduga likuiditas berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial karena likuiditas dapat dipandang sebagai tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya kepada kreditur jangka pendek. Likuiditas yang tinggi menggambarkan perusahaan yang dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya sehingga kondisi ini menunjukkan perusahaan dalam kondisi yang sehat dengan kinerja perusahaan yang baik.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

k. Leverage

Leverage mencerminkan risiko keuangan perusahaan karena dapat menggambarkan struktur modal perusahaan dan mengetahui resiko tak tertagihnya suatu utang. Semakin tinggi *leverage* suatu perusahaan, maka perusahaan memiliki risiko keuangan yang tinggi sehingga menjadi sorotan dari para *debtholders* dan menandakan pula bahwa perusahaan tersebut memiliki tingkat kepercayaan yang besar yang diberikan oleh kreditur.

Leverage diukur dengan menggunakan DER (*Debt Equity Ratio*). DER digunakan untuk memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan sehingga dapat dilihat resiko tak tertagihnya suatu utang. Teori agensi menyatakan bahwa manajemen perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi akan mengurangi pengungkapan tanggung jawab sosial yang dibuat agar tidak menjadi sorotan daripada *debtholders*.

Perusahaan dengan rasio *leverage* keuangan yang tinggi memiliki kewajiban untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas daripada perusahaan dengan rasio *leverage* keuangan yang rendah. *Leverage* berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial dikarenakan perusahaan mempunyai

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kewajiban mengungkapkan secara terperinci untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi kreditur secara jangka panjang sehingga kreditur dapat mengukur kinerja perusahaan dan tidak ada keraguan terhadap hak-hak mereka sebagai kreditur.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Media Exposure

Media exposure adalah penggunaan media yang terdiri dari jumlah waktu yang digunakan dalam berbagai media, jenis isi media, media yang dikonsumsi atau dengan media secara keseluruhan.

Untuk mengkomunikasikan CSRnya perusahaan bisa mengungkapkan kegiatan-kegiatan tersebut dengan berbagai media. Terdapat tiga media yang biasanya dipakai perusahaan dalam pengungkapan CSR perusahaan, yaitu melalui TV, koran, serta internet (WEB perusahaan). Media TV merupakan media yang paling efektif dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Akan tetapi, media ini hanya digunakan oleh beberapa perusahaan saja. Media internet (WEB) merupakan media yang efektif dengan didukung oleh para pemakai internet yang mulai meningkat. Sedangkan media koran merupakan media yang sudah sering digunakan oleh perusahaan, serta dapat digunakan sebagai dokumentasi. Dengan mengkomunikasikan CSR melalui media-media tersebut, diharapkan masyarakat mengetahui aktivitas sosial yang dilakukan perusahaan. (Soraya, 2016)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti & Tahun Penelitian	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Boby Monatani Silaen (2013)	Analisis Pengaruh <i>Size</i> Perusahaan, Tipe Industri, <i>Profitabilitas</i> , <i>Leverage</i> dan <i>Likuiditas</i> Terhadap Tingkat Pengungkapan Sosial pada Perusahaan yang <i>Go Public</i> di BEI 2010.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Size</i> Perusahaan • Tipe Industri • Basis Perusahaan • <i>Profitabilitas</i> • <i>Leverage</i> • <i>Likuiditas</i> • Pengungkapan Informasi Sosial 	<i>Size</i> Perusahaan dan <i>profitabilitas</i> menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan sosial sedangkan tipe industri, basis perusahaan, <i>leverage</i> , dan <i>likuiditas</i> tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan sosial perusahaan.
2.	Rodita Fuguh Yuliansyah (2017)	Pengaruh <i>Profitabilitas</i> , <i>Likuiditas</i> , <i>Growth</i> , <i>Media Exposure</i> , dan Umur Perusahaan Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2013-2015).	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Profitabilitas</i> • <i>Likuiditas</i> • <i>Growth</i> • <i>Media Exposure</i> • Umur Perusahaan • Pengungkapan CSR 	Hanya variabel <i>profitabilitas</i> yang berpengaruh terhadap pengungkapan CSR sedangkan variabel <i>likuiditas</i> , <i>growth</i> , <i>media exposure</i> , dan umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.
3.	Ahmad Kamil dan Antonius Herusetya (2012)	Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Kegiatan <i>Corporate Social Responsibility</i> .	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Profitabilitas</i> • <i>Likuiditas</i> • <i>Solvabilitas</i> • Ukuran Perusahaan • Pengungkapan kegiatan CSR 	Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR sedangkan <i>profitabilitas</i> , <i>likuiditas</i> , dan <i>solvabilitas</i> tidak memiliki pengaruh

© Hak cipta milik Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



				positif terhadap pengungkapan CSR.
4.	Meita Wahyu Rindawati (2015) Hak Cipta Dilindungi Undang-undang	Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan Publik Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR).	<ul style="list-style-type: none"> • Profitabilitas • Ukuran Perusahaan • <i>Leverage</i> • Kepemilikan Publik • Pengungkapan CSR 	Profitabilitas berpengaruh secara positif terhadap pengungkapan CSR sedangkan ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , dan kepemilikan publik tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR.
5.	Saripudin (2011) Undang	Pengaruh <i>Size</i> Perusahaan, Tipe Industri dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Industri di Bursa Efek Indonesia tahun 2009).	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Size</i> Perusahaan • Profitabilitas • Tipe Industri • Ukuran Dewan Komisaris • Pengungkapan CSR 	<i>Size</i> perusahaan dan tipe industri mempengaruhi secara signifikan terhadap pengungkapan CSR sedangkan profitabilitas dan ukuran dewan komisaris tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan CSR.
6.	Reka Maiyarni, Susfayetti, dan Misni Erwati (2014)	Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Likuiditas, dan <i>Leverage</i> Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) pada Perusahaan LQ-45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2012.	<ul style="list-style-type: none"> • Profitabilitas • Ukuran Perusahaan • Likuiditas • <i>Leverage</i> • <i>Corporate Social Responsibility</i> 	Profitabilitas, likuiditas, dan <i>leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR namun ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Sumber : Data Olahan



7.	Maria Wijaya (2012) © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran Dewan Komisaris • Leverage • Ukuran Perusahaan • Profitabilitas • Kinerja Lingkungan • Pengungkapan CSR 	Ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial sedangkan ukuran dewan komisaris, leverage, profitabilitas, dan kinerja lingkungan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.
8.	Ngabey Ryvandhi Ikko Wahyutama (2016)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Media Exposure Terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure.	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran Perusahaan • Profitabilitas • Leverage • Media Exposure • Pengungkapan CSR 	Ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan media exposure berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan CSR.
9.	Elok Soraya (2016)	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Sales Growth, dan Media Exposure Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia).	<ul style="list-style-type: none"> • Profitabilitas • Likuiditas • Sales Growth • Media Exposure • Pengungkapan CSR 	Profitabilitas dan media exposure berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sedangkan likuiditas dan sales growth tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
10.	Marzully Nur dan Denies Priantinah (2012)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility di	<ul style="list-style-type: none"> • Profitabilitas • Ukuran Perusahaan • Kepemilikan Saham Publik 	Ukuran perusahaan, dewan komisaris dan leverage berpengaruh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Indonesia (Studi Empiris pada Perusahaan Berkategori <i>High Profile</i> yang <i>Listing</i> di Bursa Efek Indonesia).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dewan Komisaris • <i>Leverage</i> • Pengungkapan Media • Pengungkapan CSR 	<p>terhadap pengungkapan CSR namun profitabilitas, kepemilikan saham publik, dan pengungkapan media tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.</p>
--	---	---	--	--

C Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Tingkat profitabilitas yang konsisten akan menjadi tolak ukur bagaimana perusahaan mampu bertahan dalam bisnisnya dengan memperoleh return yang memadai dengan risikonya. Profitabilitas yang tinggi menandakan bahwa kelangsungan hidup perusahaan dapat bertahan untuk jangka waktu yang panjang. Perusahaan yang mempunyai profitabilitas tinggi akan memiliki lebih banyak sumber daya untuk berinvestasi dalam kinerja sosial sehingga tingkat pengungkapan pun cenderung akan semakin luas pula.

Kamil dan Herusetya (Kamil & Herusetya, 2012: 9) berpendapat bahwa tingkat profitabilitas yang semakin besar menunjukkan perusahaan mampu mendapatkan laba yang semakin besar, sehingga perusahaan mampu untuk meningkatkan aktivitas tanggung jawab sosial, serta mengungkapkan tanggung jawab sosialnya dalam laporan tahunan dengan lebih luas. Sedangkan penelitian Saripudin (Saripudin, 2011: 82) menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial.



Oleh karena itu, peneliti ingin mencoba meneliti dengan menggunakan ROA

apakah terdapat pengaruh yang positif atau tidak antara profitabilitas dengan luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

2. Pengaruh Likuiditas terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya karena berkaitan dengan investasi jangka pendek. Tingkat likuiditas yang tinggi akan menunjukkan kuatnya kondisi keuangan perusahaan. Perusahaan dengan kondisi seperti ini cenderung akan melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas kepada pihak luar karena ingin menunjukkan bahwa perusahaan itu kredibel.

Menurut Maiyarni et al (Maiyarni et al., 2014: 90), tingkat likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial sedangkan menurut Yuliansyah (Yuliansyah, 2017: 9) menyatakan bahwa tingkat likuiditas tidak memengaruhi luas pengungkapan tanggung jawab sosial.

Oleh karena itu, peneliti ingin mencoba meneliti dengan menggunakan *Current Ratio* apakah terdapat pengaruh yang positif atau tidak antara likuiditas dengan luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

3. Pengaruh *Leverage* terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Rasio *leverage* merupakan proporsi antara total hutang terhadap ekuitas pemegang saham. Dengan adanya tingkat *leverage* yang tinggi, kreditur mampu mengukur kinerja perusahaan dan tidak ada keraguan terhadap hak-hak mereka karena kebutuhan informasi yang dibutuhkan mencukupi dan luas cakupannya.

Menurut Maiyarni et al (Maiyarni et al., 2014: 91), *leverage* berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan,



sedangkan menurut Wijaya (Wijaya, 2012: 29), *leverage* tidak memengaruhi luas pengungkapan tanggung jawab sosial secara signifikan.

Oleh karena itu, peneliti ingin mencoba meneliti dengan menggunakan DER apakah terdapat pengaruh yang positif atau tidak antara *leverage* dengan luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

4. Pengaruh *Media Exposure* terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

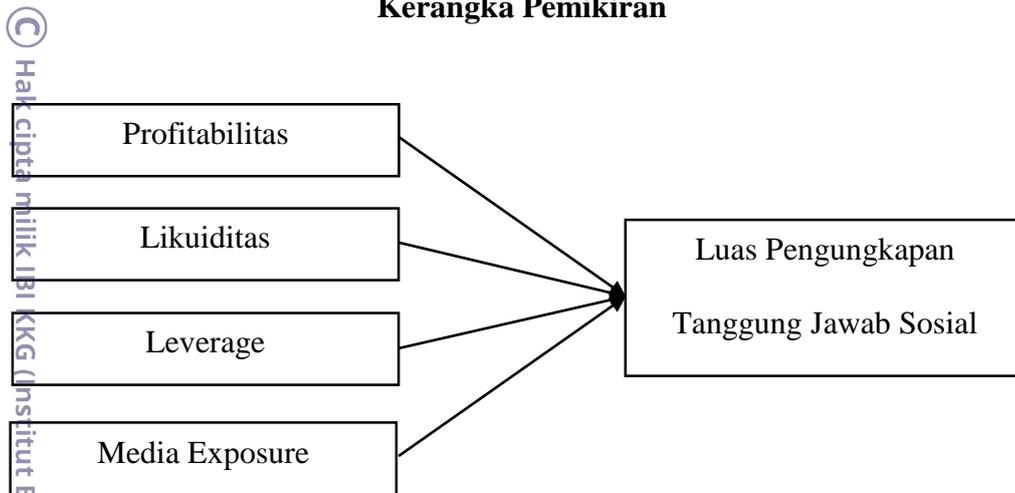
Media mempunyai peran sebagai sarana perusahaan untuk mendorong manajemen melakukan pengungkapan CSR. Media merupakan pusat perhatian masyarakat luas mengenai sebuah perusahaan. Media adalah sumber daya pada informasi lingkungan. Pengkomunikasian CSR melalui media akan meningkatkan reputasi perusahaan di mata masyarakat sesuai dengan teori legitimasi yang menjelaskan bahwa perusahaan beroperasi dalam lingkungan eksternal yang berubah secara konstan dan perusahaan berusaha meyakinkan bahwa perilaku mereka sesuai dengan batas-batas dan norma masyarakat. Perusahaan dapat mengungkapkan aktivitas *corporate social responsibility* melalui berbagai media. (Fahmi, 2015)

Menurut Wahyutama (Wahyutama, 2016: 7) terdapat hubungan positif antara *media exposure* terhadap pengungkapan luas tanggung jawab sosial. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Soraya (Soraya, 2016) yang juga menyatakan bahwa *media exposure* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan luas tanggung jawab sosial. Sedangkan menurut Nur dan Priantinah (Nur & Priantinah, 2012: 32) diungkapkan hasil penelitiannya bahwa *media exposure* tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial.

Oleh karena itu, peneliti ingin mencoba meneliti dengan menggunakan *dummy* apakah terdapat pengaruh yang positif atau tidak antara *media exposure* dengan luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis

Berdasarkan teori-teori dan kerangka pemikiran yang sudah dijabarkan di atas, peneliti mengambil hipotesis sebagai berikut :

H_{a1} : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan pertambangan.

H_{a2} : Likuiditas berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan pertambangan.

H_{a3} : *Leverage* berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan pertambangan.

H_{a4} : *Media Exposure* berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan pertambangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.